KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Anggarkan 600M Bangun Gedung Baru
Tanggal : Jumat, 27 Oktober 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-9

Anggarkan 600 M Bangun Gedung Baru

DPR Muka Tembok

DPR bener-bener muka tembok. Meski keinginannya membangun gedung baru ditentang rakyat, lembaga ini pantang mundur. Secara diam-diam, anggaran pembangunan gedung senilai Rp 601 miliar diketok dalam rapat paripurna DPR.

ANGGARAN membangun gedung baru itu diketahui pada saat rapat paripurna DPR pengesahan APBN 2018, di Gedung DPR, Rabu kemarin. Dalam APBN baru ini, pemerintah menganggarkan pendapatan sebesar Rp1.894 triliun dan belanja Rp2.220 triliun.

Nah, dari APBN ini juga diketahui ada anggaran Rp601 miliar yang dialokasikan untuk proyek penataan kawasan parlemen berupa pembangunan gedung baru dan alun-alun demokrasi. Rincianya, Rp320,44 untuk pembangunan gedung baru DPR, sisanya Rp280 miliar untuk membangun alun-alun demokrasi. Total proyek pembangunan gedung yang dimulai tahun 2018 ini sebesar Rp5,7 triliun rupiah.

Sekadar mengingatkan saja, rencana pembangunan gedung DPR ini sudah

BERSAMBUNG KE HAL 9

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

DPR Muka Tembok

DARI HALAMAN 1

menjadi polemik sejak lama. Pada Agustus lalu, polemik ini memanas lagi dan bikin heboh. Setelah diserang sana-sini, DPR akhirnya memutuskan untuk membatalkan pembangunan gedung dan apartemen yang dianggarkan tahun depan itu. tapi rupanya, diam-diam DPR melanjutkan pembahasan pembangunan gedung baru sampai kemudian baru diketahui setelah diketok.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung penuh pembangunan gedung baru tersebut. Menurut dia, pembangunan gedung akan lebih bermanfaat ketimbang misalnya, mengadakan acara seminar International Monetary Fund (IMF) yang akan digelar di Bali tahun depan, yang menghabiskan dana hampir Rp1 triliun. "DPR ini milik negara, bukan milik perorangan. Kalau seminar kan (uangnya) habis," kata Fadli, di gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Fadli mengungkapkan, anggaran yang dikeluarkan untuk seminar itu sangat fantastis yakni sebesar Rp817 miliar. Anggaran sebesar itu antara lain digunakan untuk menyewa gedung tempat acara, transportasi dan akomodasi. Sebanyak Rp300 miliar lainnya digunakan untuk membeli komputer, kursi dan peralatan lainnya yang akan menjadi fasilitas selama acara berlangsung. Dalam hal ini, Fadli minta Menkeu Sri Mulyani dan Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan lebih berhemat dalam menggunakan anggaran.

Karena itu, lanjut Fadli, jika dibandingkan mengadakan acara seminar akan lebih bermanfaat untuk membangun gedung. "Saya bilang mending bangun gedung DPR karena itu akan jadi milik negara, ada sisanya, ada jelas barangnya, bisa dipakai puluhan tahun, ratusan tahun mungkin, dan itu gedung rakyat," papar politikus Gerindra ini. Lagi pula, kata Fadli, rencana pembangunan gedung baru DPR telah dibahas sejak tahun 2015 dan telah melalui serangkaian pembahasan dengan pemerintah. Sehingga, menurutnya wajar bila dana tersebut pada akhirnya disetujui oleh Kemenkeu.

Sementara, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menjelaskan anggaran Rp601 miliar tersebut hanya untuk perencanaan pembangunan saja. "Karena (anggaran tersebut) tidak hanya khusus untuk pembangunan gedung tetapi juga untuk alun-alun demokrasi, untuk gedung-gedung DPD, DPR dan lain sebagainya," kata Agus di DPR, kemarin.

Dengan perencanaan tersebut, kata Agus, komplek parlemen diharapkan dapat tertata dengan perencanaan yang cukup matang. Politisi Demokrat ini pun menyatakan dana tersebut bukanlah sebuah pemborosan." Pasalnya, perencanaan pembangunan gedung baru DPR itu sudah semakin kompleks dan butuh dana besar. "Kalau dulu kan hanya pembangunan gedung DPR saja. Sekarang ada alun-alun demokrasi dan sebagainya," kata Agus.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, sebelum anggaran tersebut disetujui pemerintah, rencana penataan kawasan parlemen ini sudah disampaikan secara langsung beberapa kali saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dan Menkeu Sri Mulyani. Dia menyebut proyek ini sudah menjadi kebutuhan DPR akibat gedung DPR yang sekarang sudah sesak.

"Kasihan gedung lama yang kondisi fisiknya perlu perawatan. Kami berikan apresiasi kalau pemerintah sudah memahami apa yang menjadi kebutuhan teman-teman DPR," tandasnya. Dia berharap tidak ada politisasi, apalagi gedung DPR itu nanti akan menjadi aset negara melalui Sekretariat Negara.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Hasrul Azwar mengatakan pembangunan gedung baru DPR sudah bisa dieksekusi tahun depan. Rencananya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan menggarap pembangunan gedung baru tersebut. Namun Hasrul menyerahkan hal itu kepada Kesetjenan DPR untuk persoalan teknis.

Direktur Eksekutif Pemantau Kebijakan Eksekutif-Legislatif (Majelis) Sugiyanto menyayangkan sikap DPR yang menurutnya tak tahu malu. Kata dia, sikap pimpinan DPR yang menyatakan untuk menyetop rencana tersebut pada Agustus lalu ternyata hanya sebatas wacana. Dan diam-diam menganggarkan pembangunan tersebut. "Sikap DPR seperti ini akan makin menambah ketidakpercayaan masyarakat kepada DPR yang dianggap sebagai lembaga terkorup," kata Sugiyanto, tadi malam.

Sementara, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus ikut menyayangkan kenapa pemerintah menyetujui proyek pembangunan tersebut. Di satu sisi, pemerintah saat ini tengah membutuhkan anggaran besar untuk membiayai proyek pembangunan infrastruktur. Tapi dengan mudah saja menyetujui anggaran pembangunan gedung sebesar Rp600 miliar.

Padahal, dari sisi sisi urgensi, kepentingan pembangunan yang bisa langsung dirasakan rakyat itu lebih mendesak ketimbang menyediakan fasilitas bagi DPR yang sejauh ini gagal membuktikan kinerja mereka melalui fungsi-fungsi utamanya. "Tentu saja sikap pemerintah seperti ini hanya bisa dijelaskan dengan menyebutkan kepentingan politik sebagai dasarnya," katanya. BCG